

BAB II

LATAR BELAKANG LUKASHENKO DAN KEBIJAKANNYA TERKAIT PENGUNGS

Kebijakan luar negeri Belarusia mengenai migrasi dan pengungsi merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang, terutama dalam konteks hubungannya dengan Uni Eropa (UE) dan negara-negara tetangganya. Kebijakan luar negeri Belarus terkait migrasi dan pengungsi merupakan perpaduan antara strategi geopolitik, dinamika domestik, dan hubungan erat dengan Rusia, yang bersama-sama membentuk pendekatan yang pragmatis dan sering kali konfrontatif terhadap Uni Eropa (UE). Di bawah kepemimpinan Aleksandr Lukashenko, migrasi telah dijadikan alat politik untuk merespons sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik dari UE, terutama setelah pemilu presiden 2020 yang penuh kontroversi.

Hubungan antara Uni Eropa dan Belarusia telah mengalami ketegangan selama lebih dari dua dekade, dengan ketegangan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Akar sejarah panjang hubungan politik yang diwarnai konflik ini dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1990-an, setelah pembubaran Uni Soviet dan pembentukan Belarusia yang merdeka di bawah kepemimpinan Presiden Aleksandr Lukashenko. Awalnya, Uni Eropa berupaya mendorong reformasi demokrasi dan pembangunan ekonomi di Belarus, dengan memberikan bantuan keuangan dan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil. Seperti kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang lain, dimana mereka selalu berusaha untuk mempromosikan demokrasi di seluruh dunia, Belarusia juga turut menjadi salah satu sasaran dari promosi tersebut. Namun upaya tersebut harus gagal sebab adanya

penolakan dari Lukashenko yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diterapkannya setelah menjabat sebagai presiden.

Krisis migrasi tahun 2021 menjadi contoh nyata ketika pemerintah Belarus memfasilitasi arus migran dari Timur Tengah dan Afrika untuk mencapai perbatasan UE, menciptakan ketegangan di negara-negara seperti Polandia, Lituania, dan Latvia. Strategi ini bukan hanya bertujuan untuk menekan UE agar mencabut sanksi, tetapi juga untuk menguji solidaritas dan kapasitas kelembagaan UE dalam menangani krisis migrasi. Dalam konteks ini, hubungan dekat Belarus dengan Rusia memainkan peran penting, dengan Moskow memberikan dukungan politik dan ekonomi yang memungkinkan Minsk untuk mengambil risiko diplomatik yang lebih besar tanpa takut akan isolasi total.

Bab 2 ini akan membahas terkait latar belakang Aleksandr Lukashenko, termasuk Riwayat Pendidikan dan karir politiknya hingga berhasil menjabat sebagai presiden pertama dan satu-satunya di Belarusia. Presiden Lukashenko digambarkan sebagai sosok yang mampu memberikan potret menyeluruh tentang bagaimana seorang tokoh otoriter yang agresif dan mampu mempertahankan kekuasaan di era kontemporer dengan berbagai cara meski ditentang komunitas internasional. Selain itu, bab ini juga akan memuat mengenai sejarah singkat hubungan Belarusia dengan Uni Eropa serta membahas pengungsi di Belarusia serta kebijakan Lukashenko yang menghasilkan krisis di perbatasannya dengan Uni Eropa.

2.1. Latar Belakang Lukashenko

2.1.1. Masa Muda Lukashenko

Aleksandr Lukashenko lahir pada tanggal 30 Agustus 1954, di pemukiman kecil Kopys, yang terletak di wilayah Vitebsk, Belarusia. Lukashenko dibesarkan sendirian oleh ibunya, Ekaterina Trofimovna. Dalam jurnal yang ditulis oleh Anastasiya Astapova (2016) dan juga dalam laman resmi kepresidenan Belarusia, Lukashenko lahir dan besar tanpa seorang ayah. Biografi resmi menggambarkan sebagai anak petani yang tekun dan bertanggung jawab yang mengembangkan etos kerja yang kuat dan komitmen terhadap keterlibatan sosial sejak usia dini. Sepanjang masa kecilnya, ia terlibat dalam banyak aktivitas lain selain membantu ibunya bertani, termasuk olahraga dan musik. Lukashenko disebut sebagai anak yang baik dan sangat membantu ibunya yang membesarkannya sendirian (Press Service of the President of the Republic of Belarus, 2024). Namun narasi alternatif menunjukkan bahwa ia lahir di luar nikah dan ibunya menghadapi tantangan yang signifikan selama masa kecilnya, yang menyebabkan persepsi yang berbeda tentang asal-usulnya di antara orang Belarusia. Astapova melakukan sejumlah pengumpulan informasi dari masyarakat Belarusia langsung, namun tidak ada yang menjamin keakuratan informasi yang dikumpulkannya. Termasuk salah satu narasumbernya yang juga berasal dari daerah masa kecil Lukashenko, memberikan testimoni bahwa ayah Lukashenko adalah seorang tentara Jerman yang tinggal di distrik mereka ketika Perang Dunia II berlangsung. Meski informasi ini tidak jelas kebenarannya, fakta bahwa informasi mengenai orang tua Lukashenko sangatlah tertutup dan tidak pernah diklarifikasi oleh dirinya sendiri.

Latar belakangnya yang merupakan anak dari seorang petani, Lukashenko menghabiskan masa kecilnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, dan karakternya terbentuk dari situ. Lukashenko menghabiskan masa kecilnya di desa Aleksandria di Oblast Mogilev Tumbuh di lingkungan pedesaan dan pertanian, Lukashenko belajar tentang manajemen dan kepemimpinan sejak dini. Ia terlibat dalam kegiatan pertanian yang memberinya pengalaman praktis dalam mengelola sumber daya dan orang-orang di sekitarnya (Press Service of the President of the Republic of Belarus, 2024). Pada akhir tahun 1950-an dan 1960-an, pedesaan di bagian timur Belarusia di luar pinggiran ibu kota regional (oblast) merupakan daerah miskin dengan fasilitas yang kurang memadai—rumah-rumah terbuat dari kayu dengan tungku batu bata, tanpa pipa ledeng, tanpa air pipa, dan sangat sedikit permukaan jalan yang diaspal. Penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kolektif. Pada masa itu, petani kolektif merupakan salah satu pekerjaan dengan upah terendah di Uni Soviet. Dengan situasi perekonomian yang sulit, para petani ini memanfaatkan lahan di sekitar rumah mereka sebagai sumber pangan bagi keluarga. Lukashenko dalam sebuah wawancara di saluran TV Rusia dengan Andrei Karaulov sebagai pembawa acaranya pernah membagikan sebuah cerita sedih tentang ibu dan masa kecilnya (Loffe, 2014).

Saya dan ibu dulu mempunyai lahan setengah hektar. Tidak mudah untuk mengerjakan tanah ini, tetapi kami berhasil mendapatkan seekor kuda peternakan kolektif untuk membajak tanah ini, kami biasa memberikan sebotol minuman keras sebagai imbalannya, karena kami tidak mampu membeli vodka. Suatu hari kami datang untuk membajak. Saya sedang memimpin kuda, saya berusia 7 atau 8 tahun saat itu, dan ibu saya berada di belakang bajak. Tiba-tiba tetangga kami muncul dan mulai meneriakkan kata-kata kotor, memarahi ibu saya dan mendorongnya karena ibu saya sedikit melanggar batas tanah milik tetangga kami. Kejadian ini terpatri

dalam ingatan saya, dan saya ingat bagaimana saya waktu itu menangis. Pada saat itu saya berpikir: ketika saya dewasa saya tidak akan membiarkan siapapun memukuli ibu saya. (Loffe, 2014, diterjemahkan dari bahasa inggris)

Pengalaman Lukashenko sebagai anak petani kolektif yang miskin yang membantu ibunya mengajarkan nilai-nilai ketekunan dan tanggung jawab. Sifat-sifat ini menjadi landasan dalam pendekatan kepemimpinannya, di mana ia sering kali menekankan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam membangun negara.

2.1.2. Latar Belakang Pendidikan

Karena lahir dan bertumbuh di wilayah yang sederhana, latar belakang pendidikan Aleksandr Lukashenko juga tidak terlibat dalam pendidikan di sekolah atau universitas yang bergengsi mana pun. Perjalanan akademisnya pada garis besar berlangsung dalam kerangka pendidikan Uni Soviet (Astapova, 2016). Dia bersekolah di sekolah menengah di Aleksandria, Distrik Shklov, tidak ada spesifik disebutkan Lukashenko mengikuti pendidikan menengah pada umur berapa, dan tahun berapa, namun telah diklarifikasi bahwa Lukashenko bersekolah di sekolah pedesaan yang biasa-biasa saja. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, pada tahun 1971 ia mendaftar di Kuleshov Mogilev State Pedagogical Institute dan mengambil jurusan Sejarah dan lulus di tahun 1975. Lukashenko selalu mendapat nilai bagus (Press Service of the President of the Republic of Belarus, 2024), dan mahasiswa dengan IPK yang tinggi kemudian mendapatkan beasiswa. Lukashenko yang saat itu masih kuliah mengakui bahwa uang yang dikumpulkannya melalui beasiswa dan bonus 10 rubel setiap bulan dari kegiatan aktivis sosialnya lebih

banyak dari gaji ibunya yang merupakan petani kolektif dengan gaji 42 rubel sebulan.

Di masa mudanya, Lukashenko tampaknya sangat dihantui oleh masalah keuangannya yang sulit. Dia melakukan berbagai macam kegiatan yang menghasilkan uang. Di perguruan tinggi, satu-satunya tempat untuk aktivisme mahasiswa disediakan oleh Liga Muda Komunis (Komsomol), dan Lukashenko memanfaatkan sepenuhnya lingkungan tersebut dengan menjadi pengajar, editor surat kabar perguruan tinggi, fotografer, dan pejabat serikat pekerja. Dalam kapasitasnya yang sebagai pejabat serikat kerja, ia unggul dalam membela hak-hak siswa yang dirugikan. Selama liburan musim panas yang panjang, dia selalu berpartisipasi dalam tim konstruksi mahasiswa—sebuah cara legal bagi mahasiswa untuk mendapatkan uang sambil melakukan pekerjaan dengan bayaran terendah di lokasi konstruksi. Bahkan saat masa sekolah, ia kerap menurunkan muatan kereta barang. Segera setelah lulus dengan pujian, Aleksandr menikah dengan seorang kenalan sekolah menengahnya, Galina Zhelnerovich, yang satu tahun lebih muda darinya dan merupakan putri seorang guru (Loffe, 2014).

Gambar 2. 1 Aleksandr Lukashenko Saat Menjadi Mahasiswa



Sumber: *Press Service of the President of the Republic of Belarus* (2024)

<https://president.gov.by/en/president/biography>

Meski lulus dengan predikat pujian, Lukashenko belum punya kesempatan untuk tinggal dan menetap di kota yang mengharuskannya kembali ke distrik lamanya sebelum menjadi mahasiswa. Lukashenko kembali ke kota Shklov, tempat kedudukan rayon, dia menjadi Sekretaris Muda Liga Komunis di Sekolah Menengah Nomor Satu. Dia bertahan di posisi itu hanya selama tiga bulan, setelah itu dia direkrut menjadi tentara. Saat itu di Uni Soviet diberlakukan laki-laki yang lulus dari perguruan tinggi tanpa jurusan militer (dan karena Lukashenko saat itu tidak mempunyai keahlian militer selain dari jurusan sipil) pasti akan direkrut selama satu tahun setelah lulus.

Lukashenko terlepas dari banyaknya kegiatan dan pekerjaan yang diikutinya (akan dijelaskan pada bagian karir politik Lukashenko di halaman selanjutnya),

pada tahun 1981, Lukashenko lanjut menjalani pendidikan di Akademi Pertanian Belarusia di Horki, lembaga ini dikenal karena fokusnya pada ilmu pertanian, tetapi tidak tergolong universitas elit. Ia lulus pada tahun 1985 dengan gelar di bidang manajemen pertanian (Press Service of the President of the Republic of Belarus, 2024). Pengalaman perkuliahannya ini kemudian yang memberinya landasan yang kuat untuk usahanya di masa depan di bidang pertanian dan politik.

2.1.3. Karir Politik

Sebelum terjun ke dunia politik, Lukashenko memiliki riwayat panjang dalam berganti-ganti pekerjaan. Mulai dari pengalamannya yang aktif dalam organisasi dan aktivis sosial, serta mengambil banyak pekerjaan selama perkuliahan, Lukashenko setelah lulus kuliah juga melakukan berbagai macam pekerjaan. Setelah direkrut menjadi tentara, Lukashenko muda ditugaskan ke unit militer penjaga perbatasan yang ditempatkan di Oblast Brest di perbatasan Polandia. Di sini ia melanjutkan karirnya sebagai aktivis Komsomol dan menjadi calon anggota partai (Astapova, 2016). Tahap ini merupakan salah satu langkah penting dalam karir politiknya. Setelah satu tahun mengabdikan, Lukashenko mendapatkan pekerjaan di kota Mogilev sebagai sekretaris Komsomol di direktorat toko kelontong milik negara. Sejak saat itu (1977) hingga tahun 1987, ia sering berganti pekerjaan.

Berikut adalah posisi-posisi dalam pekerjaan Lukashenko di masa lalu yang mencerminkan progress dalam karir politiknya sebelum menjadi presiden Belarusia (Loffe, 2014).

- 1) *Komsomol Secretary in the State-run Directorate of Grocery Stores (1977)*: setelah menyelesaikan dinas militer, Lukashenko memulai karirnya sebagai sekretaris Komsomol, yang bertugas mengawasi kegiatan pemuda dan mempromosikan ideologi Komunis di sektor bahan makanan di Mogilev. Peran ini menandai dimulainya keterlibatannya dalam struktur Partai Komunis.
- 2) *Ideological Instructor in a District Communist Party Cell (1977)*: tak lama setelah pekerjaan pertamanya, ia beralih ke posisi instruktur ideologi, di mana ia bertanggung jawab untuk mendidik anggota partai dan mempromosikan kebijakan partai di kota Mogilev.
- 3) *Guru Sejarah di Sekolah Menengah di Shklov (1977-1980)*: Lukashenko kembali ke kampung halamannya di Shklov, di mana dia bekerja sebagai guru sejarah di sekolah menengah tempat dia bersekolah. Peran ini melibatkan mengajar siswa tentang sejarah dan mungkin terlibat dalam kegiatan pendidikan komunitas.
- 4) *Vice Chairman of a Collective Farm (Agustus 1982 - Mei 1983)*: Lukashenko kemudian mengambil peran kepemimpinan di bidang pertanian sebagai wakil ketua pertanian kolektif, yang mencakup pengelolaan produksi pertanian dan pengawasan operasi pertanian.
- 5) *Deputy Director of the Shklov Construction Materials Factory (1983-1985)*: setelah bekerja di pertanian kolektif, Lukashenko menjadi wakil direktur sebuah pabrik yang memproduksi bahan konstruksi, termasuk penggunaan

tenaga kerja penjara. Posisi ini kemungkinan besar melibatkan tanggung jawab administratif dan operasional di dalam pabrik.

- 6) *Secretary of the Communist Party Cell of the Lenin Collective Farm (Maret 1985)*: Dalam peran ini, ia bertanggung jawab atas aktivitas partai dan pemerintahan di dalam pertanian kolektif, sehingga semakin memperkuat posisinya di dalam Partai Komunis.
- 7) *Director of the State Farm Gorodets (Maret 1987 - Juli 1994)*: jabatan terlama Lukashenko sebelum menjabat sebagai presiden adalah sebagai direktur pertanian negara Gorodets. Ia mengelola operasional pertanian dan terlibat dalam produksi pertanian hingga ia terpilih sebagai presiden pada tahun 1994. Peran ini memungkinkannya memperoleh pengalaman signifikan dalam manajemen dan kepemimpinan pertanian.

Posisi-posisi ini mencerminkan kenaikan bertahap Lukashenko di Partai Komunis dan meningkatnya keterlibatannya dalam peran pertanian dan administratif di Belarus. Pengalaman ini membantunya memahami dinamika sosial dan politik, serta pentingnya dukungan publik dalam mencapai tujuan politik. Pada tahun 1990, ia terpilih sebagai anggota Parlemen Republik Sosialis Soviet Belarus. Dengan menggambarkan dirinya sebagai pejuang yang serius melawan korupsi sebelum menjadi presiden, Lukashenko mencari dukungan politik dari masyarakat dengan metode tersebut. Ia memimpin *Supreme Soviet's Commission on Corruption*, yang merupakan masalah besar pada saat itu karena kondisi kehidupan yang lebih buruk dan meningkatnya kesenjangan sosial. Pada bulan Desember 1993, laporan publiknya tentang korupsi mendapat perhatian dan dukungan karena

sejalan dengan keinginan masyarakat untuk keadilan dan akuntabilitas sosial. Metode ini meningkatkan popularitasnya dan kelompok pendukung spontan muncul di seluruh negeri, yang berkontribusi pada kemenangan pemilu 1994 (Loffe, 2014).

2.2. Sejarah Singkat Hubungan antara Belarusia-Uni Eropa

Uni Eropa dan Belarusia telah memiliki sejarah hubungan yang buruk dalam jangka waktu yang lama. Hubungan keduanya dipetakan sebagai lingkaran setan, dimana konfliknya sulit sekali menemukan titik terang. Belarusia adalah negara berukuran sedang yang terletak di antara Uni Eropa, Rusia setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Partisipasi Belarusia dalam organisasi di bidang ekonomi dan politik pasca-Soviet seperti EAEU (*Eurasian Economic Union*) dan hubungan bilateralnya dengan Rusia sangat mempengaruhi negara ini meskipun sudah merdeka. Kebijakan luar negerinya telah dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan ini, yang seringkali lebih sesuai dengan kepentingan Rusia (Titarenko, 2018). Dengan berpihaknya Belarusia dengan Rusia, ditambah pemerintahannya yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, hubungan Uni Eropa dengan Belarusia semakin memburuk. Serangkaian kebijakan dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang bertetangga ini untuk menghasilkan kerugian bagi lawan.

2.2.1. Fase Perbaikan Hubungan

Pada beberapa kesempatan sebelum penurunan yang signifikan dalam hubungan politik antara Belarusia dengan Uni Eropa di tahun 2020, jauh

sebelumnya Belarusia dan Uni Eropa pernah mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka yang mengkhawatirkan. Pada awal 2000-an, ada upaya dari Lukashenko yang berusaha untuk mendiversifikasi hubungan internasional Belarusia dan mengurangi ketergantungan pada Rusia. Beberapa sanksi yang dikenakan oleh UE dicabut sebagai respons terhadap langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Belarus. Namun, krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan penurunan harga minyak memaksa Belarusia kembali bergantung pada Rusia untuk dukungan ekonomi. Dalam konteks ini, Lukashenko mulai menunjukkan sikap lebih dekat kepada Moskow, yang mengakibatkan ketegangan baru dengan UE (Nizhnikau, 2020).

Setelah pembebasan tahanan politik di Belarusia pada tahun 2015, hubungan kedua negara membaik selama lima tahun. Kebijakan Uni Eropa saat itu dituangkan dalam Kesimpulan Dewan tentang Belarusia pada bulan Februari 2016. Hal ini mengakibatkan pencabutan sebagian besar tindakan pembatasan dari Uni Eropa terhadap Belarusia, peningkatan dialog kebijakan, dan peningkatan bantuan keuangan (Astapenia & Matsukevich, 2022). Pada tahun 2016, negosiasi mengenai Prioritas Kemitraan Uni Eropa-Belarusia juga dimulai dan ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral dan menetapkan kerangka kerja strategis untuk kerja sama. Belarusia telah menjadi peserta aktif dalam inisiatif Kemitraan Timur. Perjanjian Fasilitasi Visa dan Penerimaan Kembali Uni Eropa-Belarusia mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020 (European Union, 2024). Sejak saat itu, hubungan terus memburuk seiring dengan tindakan represif Lukashenko terhadap oposisi politik dan media.

2.2.2. Pemilu Presiden Belarusia Agustus 2020

Periode perbaikan hubungan antara Belarusia dengan Uni Eropa terhenti karena memburuknya situasi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum di Belarusia menjelang pemilu, berikut pelaksanaan dan sesudah pemilu yang curang pada 9 Agustus 2020. Menyusul adanya penindasan massal terhadap pengunjuk rasa, masyarakat sipil dan media, Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa mengadopsi *Conclusions on Belarusia* pada 12 Oktober 2020 dan yang memandu kebijakan Uni Eropa saat ini terhadap Belarusia (European Union, 2024).

Pada Agustus 2020, terjadi intimidasi dan penindasan dengan menggunakan kekerasan kepada para pengunjuk rasa—yang melakukan demonstrasi dengan damai—anggota oposisi Lukashenko, dan kepada para jurnalis. Selain itu, Uni Eropa menyebut bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilihan presiden Belarusia saat itu. Uni Eropa menyebut bahwa hasil pemilu Belarusia tidak sah dan mereka mengutuk pelaksanaannya tidak bebas dan adil yang mana ini berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta tidak memenuhi standar internasional, Uni Eropa, selain tidak mengakui hasil pemilihan Presiden Belarusia ini, juga mengutuk kekerasan yang diterima para demonstran (European Council and Council of the EU, 2021). Menurut Kementerian Dalam Negeri Belarusia, polisi menahan sekitar 6.000 demonstran hanya dalam tiga hari sejak 9 Agustus 2020 dan lebih dari 32.000 warga sipil yang ditahan dan mengalami kekerasan dari para anggota militer (Freedom House, 2023).

Menanggapi hal tersebut Uni Eropa pada 2 Oktober memberlakukan tindakan pembatasan terhadap empat puluh orang yang diduga melakukan

intimidasi dan penindasan terhadap demonstran, anggota oposisi, dan jurnalis setelah pemilihan presiden Belarusia tahun 2020, serta pelanggaran proses pemilihan. Lalu pada 16 November menambahkan 15 anggota otoritas Belarusia, termasuk Aleksandr Lukashenko serta putranya dan Penasihat Keamanan Nasional Viktor Lukashenko, ke dalam daftar individu yang dikenakan sanksi. Salah satu pembatasan adalah larangan bepergian dan pembekuan aset. Larangan bepergian menghalangi orang yang terdaftar untuk memasuki atau melintasi wilayah Uni Eropa, sementara pembekuan aset menghalangi dana atau sumber daya ekonomi orang-orang yang terdaftar. Selain itu, tidak diizinkan bagi warga negara dan perusahaan UE untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdaftar (European Council and Council of the EU, 2023).

2.2.3. Insiden Penerbangan Ryanair Mei 2021

Hingga pertengahan tahun 2021, hubungan keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Lukashenko seperti tidak merasa keberatan dengan sanksi yang sebelumnya dijatuhkan oleh Uni Eropa kepada 40 individu—yang diantaranya Lukashenko sendiri (European Council and Council of the EU, 2023), pada Mei 2021 kembali mendapat tuduhan dari Uni Eropa. Demi menangkap jurnalis asal Belarusia yakni Raman Protasevich dan Sofia Sapega, Belarusia disebut Uni Eropa mencegat penerbangan pesawat Ryanair, yang melakukan penerbangan dari Yunani menuju Lithuania dan memaksanya untuk mendarat di Minsk, ibukota Belarusia. Dari penerbangan ini, pemerintahan Lukashenko dikabarkan berhasil menahan dan mendetensi kedua jurnalis tersebut (Kompas, 2021). Lukashenko menggunakan

kekuatan militer, yakni pesawat tempur untuk menghentikan pesawat ini dan pilot Ryanair hanya mampu mematuhinya. Keamanan menjadi alasan diberhentikannya penerbangan ini dengan dugaan adanya ancaman dari pesawat tersebut (Lukashenko, 2021).

Menanggapi peristiwa ini, sanksi dijatuhkan kepada 183 individu dan 26 institusi dari Belarusia oleh Uni Eropa yang menganggap bahwa Belarusia melanggar hak-hak dasar dan hak universal masyarakatnya, diantaranya adalah Presiden Aleksandr Lukashenko, penasihat, petinggi-petingginya, dan beberapa orang penting lainnya. Pada tanggal 4 Juni, Uni Eropa memutuskan untuk memperketat aturan yang ada terkait dengan situasi di Belarus. Mereka memberlakukan larangan penerbangan melintasi wilayah udara UE dan akses ke semua jenis maskapai penerbangan Belarusia ke bandara UE. Negara-negara anggota UE juga diminta untuk menolak izin pesawat apa pun yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Belarusia untuk mendarat, lepas landas, atau terbang di luar wilayah mereka (European Council and Council of the EU, 2023).

2.3. Krisis Pengungsi di Perbatasan antara Belarusia-Uni Eropa

Karena krisis migrasi yang signifikan di perbatasannya dengan Polandia dan beberapa negara UE lainnya, kebijakan pengungsi Belarusia pada November 2021 menarik perhatian internasional. Ribuan migran, terutama dari Timur Tengah, yang berusaha memasuki UE, menandai krisis ini. Situasi ini ditandai oleh masalah kemanusiaan serta ketegangan geopolitik yang kompleks. Uni Eropa sebelumnya sudah sepakat untuk memperketat penjagaan di perbatasan dan penyeleksian para

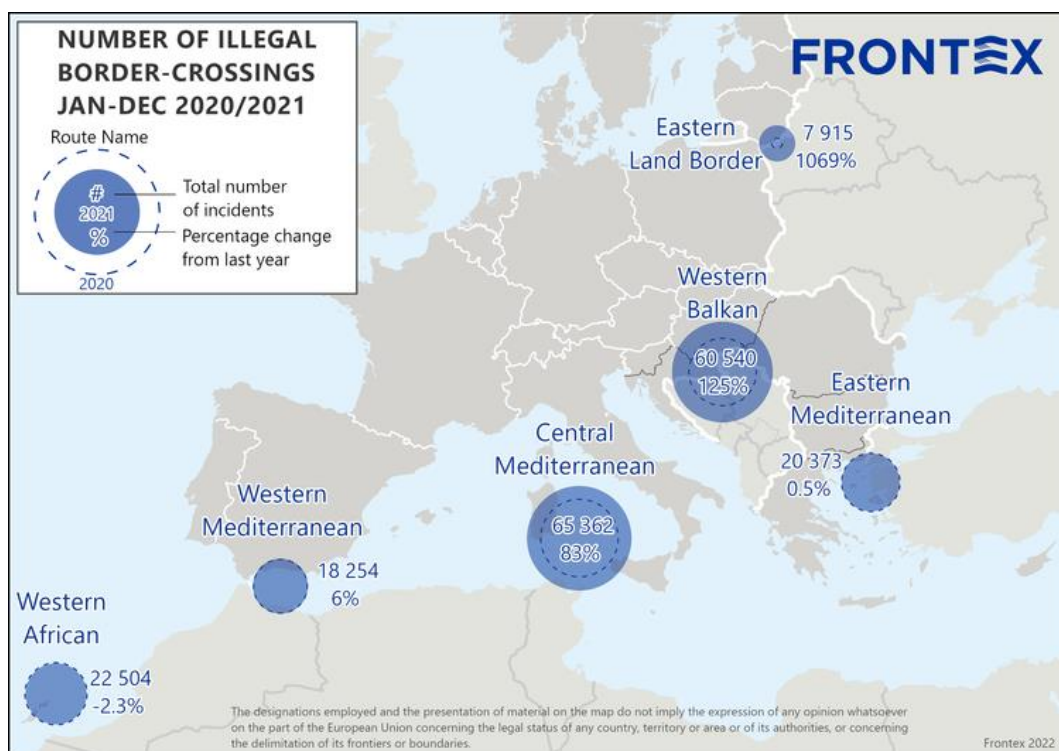
migran yang bermigrasi untuk mencari suaka sejak Taliban mengklaim bahwa Afghanistan telah sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Uni Eropa menyadari gelombang pengungsi akan semakin meningkat dan untuk mencegah mimpi buruk dari krisis pengungsi di 2015 lalu terjadi lagi, Yunani, Polandia, dan pintu-pintu masuk para migran ini diperketat bahkan sampai dibangun tembok dan pagar kawat berduri (Grzeškowiak, 2023).

Krisis ini muncul pada pertengahan tahun 2021 ketika Presiden Aleksandr Lukashenko dari Belarus mulai memfasilitasi imigran dari Timur Tengah. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa setelah pemilihan presiden Belarus yang kontroversial pada tahun 2020 dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang mengikutinya. Dengan melonggarkan pembatasan visa dan mempromosikan paket perjalanan melalui agen perjalanan Belarus (BBC News, 2021), pemerintah Belarus mengirimkan migran ke perbatasan dengan Polandia, Lithuania, dan Latvia. Lukashenko secara terbuka menyatakan pada tahun 2021 bahwa Belarus tidak akan lagi mencegah para migran menyeberang ke Uni Eropa (Lukashenko, 2021) dan mendorong mereka untuk pergi ke Polandia, mengatakan bahwa mereka akan menemukan kehidupan yang lebih baik di Eropa.

Lukashenko mendapatkan tuduhan Belarus telah menggunakan isu migrasi sebagai instrumen geopolitik untuk merespons tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan UE setelah pemilu 2020 yang penuh kontroversi. Strategi ini berhasil memanfaatkan ribuan orang dari Timur Tengah dan Afrika yang datang ke Belarus dengan visa turis dan maskapai milik negara, seperti Belavia, selama

krisis migrasi 2021. Lebih dari 8.000 orang mencoba melarikan diri dari Belarus ke Polandia hanya dalam beberapa bulan puncak krisis, menurut data dari Frontex (2022). Lonjakan pengungsi yang masuk secara ilegal dari Belarus ke Uni Eropa sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni naik sebesar 1069%.

Gambar 2. 2 Data Migrasi Ilegal yang Masuk ke Uni Eropa tahun 2020-2022



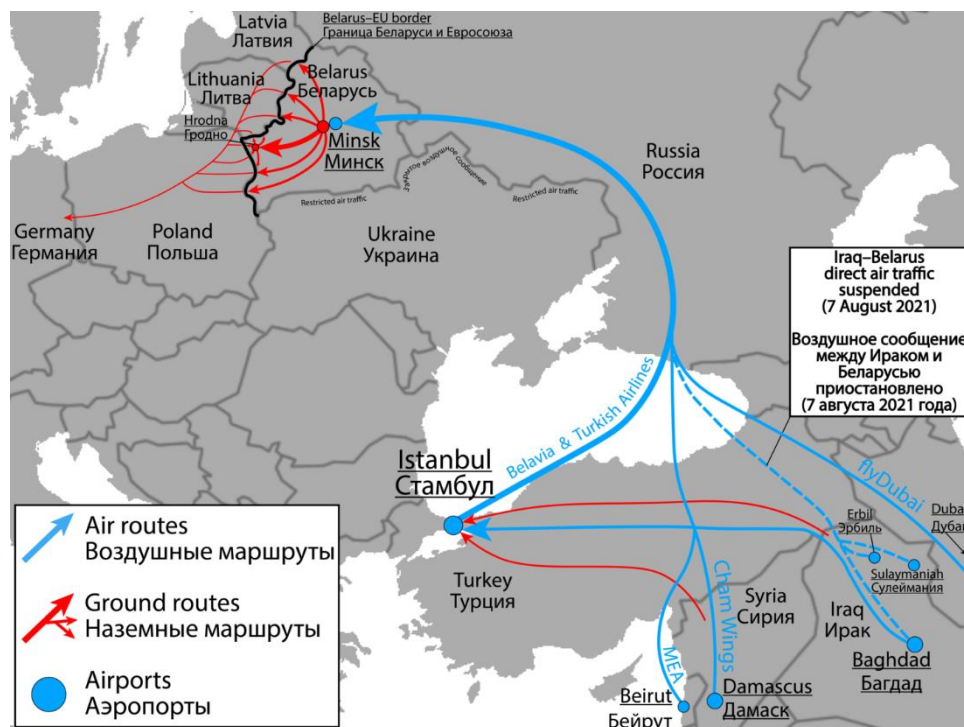
Sumber: Fontex: *EU external borders in 2021: Arrivals above pre-pandemic levels, (2022)*

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menimbulkan konflik di negara-negara anggota Uni Eropa seperti Polandia, Lithuania, dan Latvia, sekaligus menguji komitmen UE dalam menangani masalah migrasi. Sebagai sekutu utama Belarus, Rusia mendukung kebijakan ini melalui dukungan politik dan ekonomi, yang

memungkinkan Lukashenko untuk bertindak lebih agresif tanpa mengalami isolasi total. Migrasi digunakan sebagai tekanan politik dan alat untuk merusak stabilitas keamanan di perbatasan timur UE dalam strategi *hybrid warfare* (Kuzelewska & Piekutowska, 2023).

Aleksandr Lukashenko bukannya mendukung aksi memperketat perbatasan di pintu masuk ke Eropa, justru melakukan sebaliknya, yakni memfasilitasi para migran ini untuk sampai ke perbatasan Polandia, Latvia, dan Lithuania yang merupakan pintu masuk menuju Uni Eropa. Hal ini mengakibatkan Polandia harus mengerahkan 12.000 tentaranya ke perbatasan untuk mengatasi krisis dan mencegah migran masuk ke Uni Eropa (CNN Indonesia, 2023).

Gambar 2. 3 Peta Jalur Pengungsi yang Masuk Melalui Belarusia



Sumber: Congressional Research Service (CRS), (Margesson, Mix, & Welt, 2021)

Gambar 2. 4 Peta Perbatasan Belarus-Uni Eropa di Jalur Penyeberangan

Pengungsi



Sumber: Congressional Research Service (CRS), (Margesson, Mix, & Welt, 2021)

Kebijakan migrasi Belarus menunjukkan kontradiksi antara praktik nyata dan retorika publik. Meskipun Belarus secara hukum adalah penandatangan Konvensi PBB tentang Pengungsi 1951, perlindungan terhadap hak-hak migran dan pengungsi sangat terbatas di dunia nyata. Data UNHCR (2022) menunjukkan bahwa tingkat penerimaan suaka resmi di Belarus hanya sekitar 500 permohonan setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah Belarus dituduh oleh Barat mengontrol percakapan publik tentang krisis migrasi. Pemerintah diklaim menyebarkan berita

yang menggambarkan migran sebagai bagian dari konspirasi Barat untuk mendestabilisasi Belarus, dan menggambarkan rezim Lukashenko sebagai pihak yang memperlakukan migran dengan baik (Filipec, 2022).

Di sisi lain, organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM selalu menyerukan dan menyatakan secara terbuka bahwa instrumentalisasi migran dan pengungsi untuk mencapai tujuan politik adalah hal yang menyedihkan dan harus dihentikan. Mengambil keuntungan dari keputusan dan kerentanan migran dan pengungsi dengan menawarkan janji-janji yang tidak realistis dan menyesatkan tidak dapat diterima dan memiliki konsekuensi kemanusiaan yang serius. Kedua organisasi telah berulang kali menegaskan kepada otoritas Belarusia perlunya menjaga kesejahteraan rakyat dan menghindari terciptanya situasi kemanusiaan yang sulit. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi kemanusiaan yang memburuk, di mana ribuan migran terjebak di wilayah perbatasan dalam cuaca ekstrem dengan akses terbatas terhadap makanan, perlindungan, dan layanan kesehatan. Ketidakkonsistenan antara kepatuhan formal terhadap norma hukum internasional dan praktik represif di lapangan mencerminkan pendekatan pragmatis Belarus yang memprioritaskan kepentingan politik domestik dan diplomatik di atas kepentingan kemanusiaan (UNHCR, 2021).

Aleksandr Lukashenko berulang kali membantah tuduhan bahwa Belarus menggunakan tekanan geopolitik untuk mendorong arus migran ke perbatasan Uni Eropa. Lukashenko menuduh UE bertanggung jawab atas krisis tersebut, menyatakan bahwa UE gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya terhadap para

migran. Selain itu, dia menekankan bahwa Belarus tidak bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi hanya membantu mewujudkan keinginan para migran dan tidak bertanggung jawab untuk menghentikan migran yang ingin menuju Eropa Barat. Lukashenko juga sering mengatakan bahwa sanksi ekonomi Uni Eropa yang dijatuhkan terhadap Belarus membuatnya lebih sulit untuk mengelola arus migrannya (BBC News, 2021).

Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko secara eksplisit membantah tuduhan bahwa ia menggunakan migran sebagai senjata politik untuk menekan Uni Eropa di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. Lukashenko menyatakan dalam wawancara dengan CNN pada Oktober 2021 bahwa Belarus hanya bertindak sebagai negara transit karena lokasi geografisnya yang strategis daripada mengorganisir arus migran secara sistematis untuk mencapai perbatasan UE. Lukashenko juga menolak tuduhan bahwa pemerintahannya memungkinkan penerbangan migran dari Timur Tengah ke Belarus, yang kemudian akan dibawa ke perbatasan Uni Eropa. Menurutnya, kebijakan luar negeri negara-negara Barat di Timur Tengah dan Afrika Utara telah menyebabkan migrasi massal dan krisis kemanusiaan, yang menjadikan migrasi sebagai masalah global. Dia menegaskan bahwa Belarus tidak dapat bertanggung jawab atas keputusan politik yang dibuat oleh negara-negara Barat di wilayah itu (CNN, 2021).

Lukashenko juga menuduh Uni Eropa hipokrit dan tidak konsisten dalam menangani krisis migrasi. Ia menekankan bahwa Uni Eropa mengabaikan keadaan kemanusiaan di perbatasan dan memilih untuk menyalahkan Belarus daripada

mencari solusi bersama. Lukashenko menggambarkan Belarus sebagai korban dari dinamika migrasi global, bukan sebagai dalang di balik arus migrasi ke perbatasan Uni Eropa. Secara keseluruhan, dia menyatakan bahwa kebijakan buruk Barat di Timur Tengah dan tindakan represif UE terhadap migran adalah penyebab utama krisis migrasi. Dia juga menolak tuduhan bahwa Belarus memiliki rencana yang disengaja untuk mengatur arus migrasi untuk keuntungan politik (BBC News, 2021).

Berikut adalah kutipan langsung dari wawancara Lukashenko dengan CNN pada Oktober 2021, di mana ia membantah tuduhan bahwa Belarus menggunakan migran sebagai senjata politik:

"We are not blackmailing anyone with illegal migrants. We have never done this and we don't intend to. But if someone thinks that we will close the border with Poland, Lithuania, Latvia and Ukraine and become a camp for migrants from Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Tunisia, Libya, and other African and Asian countries, then they are mistaken." (Wawancara dengan CNN, Aleksandr Lukashenko, 2021)

Terjemahan:

"Kami tidak memeras siapa pun dengan migran ilegal. Kami tidak pernah melakukan itu dan kami tidak berniat melakukannya. Tetapi jika ada yang berpikir bahwa kami akan menutup perbatasan dengan Polandia, Lithuania, Latvia, dan Ukraina serta menjadi kamp bagi migran dari Afghanistan, Iran, Irak, Suriah, Tunisia, Libya, dan negara-negara Afrika serta Asia lainnya, maka mereka salah."

Lukashenko dengan tegas menolak tuduhan bahwa Belarus sengaja menggunakan migran sebagai alat politik dalam pernyataannya. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa Belarus tidak akan berfungsi sebagai "penjaga perbatasan" bagi Uni Eropa, terutama dalam situasi di mana hubungan dengan UE sangat buruk.

Dari serangkaian aktivitas permusuhan yang sudah terjadi antara Belarusia dengan Uni Eropa di atas, dapat disimpulkan bahwa Presiden Lukashenko mencerminkan perilaku yang kuat dan percaya diri serta tetap mengeluarkan respon yang kontroversial meski Uni Eropa sudah menjatuhkan sanksi berkali-kali. Presiden adalah seorang manusia yang pada hakikatnya memiliki kepribadian dan kondisi psikis yang berbeda-beda. Kepribadian yang agresif, sifat keras kepala yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, serta kediktatoran yang dimilikinya tersebut tertuang dan tergambar jelas di kebijakan yang diambil oleh Lukashenko. Mark Lenzi mengungkapkan Lukashenko yang melakukan perubahan konstitusi untuk memperpanjang masa kepemimpinannya 5 tahun setelah kemenangannya dalam pemilihan umum presiden tahun 1994. Untuk mengurangi hambatan, Lukashenko mengambil tindakan untuk mengontrol media dan Lembaga Swadaya Masyarakat, menggulingkan parlemen yang ada, membubarkan Mahkamah Konstitusi, dan semua kekuasaan bertumpuk di tangannya. Presiden benar-benar membatasi kemerdekaan berpendapat, serta menggulingkan peradilan yang independen—dua prasyarat untuk mempertahankan keberadaan *civil society* atau masyarakat madani (Lenzi, 2002).

Uni Eropa secara terang-terangan tidak menyukai tindakan-tindakan Lukashenko yang dianggap melenceng jauh dari nilai-nilai demokrasi dan melanggar HAM. Sejumlah sanksi yang dijatuhkan tidak juga menjadi solusi atau titik terang dari buruknya hubungan politik kedua aktor ini. Seperti misalnya pada akhir 2021, Lukashenko mengancam akan memutus jalur pipa gas alam dari Rusia ke Eropa yang melewati Belarusia, ini disebut sebagai balasan atas ancaman yang

diterima Lukashenko atas tindakannya yang menyebabkan krisis pengungsi di perbatasan Polandia (CNN Indonesia, 2021).

Kegagalan Uni Eropa dalam menekan rezim Lukashenko dinilai sebagai keterbatasan pengaruh yang dimiliki oleh Uni Eropa terhadap Belarusia. Hubungan mereka yang sangat dinamis dan berubah-ubah sepanjang sejarah. Selain itu, beberapa negara Uni Eropa bersikap hati-hati dalam menekan Belarus karena khawatir dengan hubungannya dengan Rusia. Belarus sangat dekat dengan Moskow, dan Uni Eropa berhati-hati dalam mendorong Belarus lebih jauh ke dalam lingkup pengaruh Rusia, yang dapat meningkatkan ketegangan dengan Rusia dan merusak kebijakan Kemitraan Timur Uni Eropa yang lebih luas (Giusti, 2023).